

# STRATEGI PEMERINTAH RIAU DALAM MENINGKATKAN INVESTASI ASING DI PROVINSI RIAU

Oleh : Tengku Rizki Heryansyah

Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP., M.A

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRACT

*The objective of this thesis is to understand the extent of the Riau Provincial Government's strategies aimed at enhancing investment. The growth of investment, encompassing both Domestic Investment (DCI) and Foreign Direct Investment (FDI), is undoubtedly linked to the economic advancement of the region, specifically Riau Province. However, the absence of a robust and transparent policy framework poses a challenge in attracting sufficient investment to Riau Province. While the quantitative investment rate has experienced an upsurge, the lack of comprehensive legal safeguards can be a concern. Besides quantitative factors, various other aspects converge in the realm of investment, including institutional dynamics, policy formulation, tax certainty, licensing procedures, and political stability.*

*This research employs a descriptive approach, collecting data through case studies from the literature. The foreign direct investment theory and the perspective of economic liberalism are harnessed to analyze the strategies implemented by Riau's government for fostering investment in the province. The utilization of these theories and concepts aids in comprehending the government's strategies more effectively. The findings of this research indicate that the impediments to increased investment encompass several aspects, such as insufficiently skilled human resources, budgetary constraints, limited coordination both horizontally and vertically among institutions, and inadequate implementation of technology and information systems. To ensure a conducive investment climate, the Riau provincial administration must further enhance its efforts, particularly as the current infrastructure in Riau necessitates improvements, particularly in terms of specialized company transportation networks.*

*Keywords: strategy, investment, promote.*

## PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah sejak tahun 2001, setiap pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengelola wilayahnya, termasuk dalam

menggal potensi dan mendorong pemberdayaan daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Setiap daerah juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Suasana investasi yang positif tentu

akan berdampak pada pertumbuhan yang sehat, hal ini erat kaitannya dengan produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu menciptakan kondisi yang mendukung daya saing investasi yang optimal.<sup>1</sup>

Produk yang dihasilkan melalui teknologi tentu memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk alamiah. Investasi asing yang sering dilakukan oleh negara-negara maju, serta negara yang menerima investasi, mendapatkan keuntungan berupa transfer teknologi, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan dalam skala ekspor nasional.<sup>2</sup>

Investasi dari luar negeri memiliki peran yang signifikan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, meskipun mendapatkan investor asing bukanlah tugas yang mudah. Setidaknya, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi ketertarikan investor asing terhadap suatu daerah. Beberapa hal yang mempengaruhi keputusan investor dalam menanamkan modal termasuk: (1.) Ketersediaan sumber daya alam. (2.) Ketersediaan tenaga kerja terampil. (3.) Stabilitas politik dan ekonomi yang memberikan jaminan kepastian berbisnis. (4.) Kebijakan pemerintah yang

diterapkan. (5.) Proses pemberian izin yang mudah dan lancar.<sup>3</sup>

Di samping itu, setiap investasi yang datang juga mempertimbangkan tingkat daya saing dalam perkembangan wilayah tersebut. Membangun daya saing investasi memerlukan upaya, proses, dan berbagai faktor lainnya. Keberhasilan dalam meningkatkan daya saing juga terkait erat dengan formulasi kebijakan investasi yang tepat dan penyediaan layanan berkualitas. Selain kondisi makroekonomi yang stabil, pengembangan sumber daya manusia yang baik, dan peningkatan infrastruktur penunjang juga memiliki peran yang penting. Kondisi semacam ini akan mendorong sektor swasta untuk berperan aktif dalam perekonomian.<sup>4</sup>

Masing – masing daerah memiliki kualitas dan daya saing yang berbeda karena karakteristik seperti SDM dan SDA alam, serta letak atau posisi geografis. Namun, daya saing ini mendasar untuk perkembangan dalam hal ekonomi, investasi, industri, daya serap lapangan kerja, dan pangsa pasar hasil pertanian, industri, dan jasa. Daya saing investasi menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam pengendalian tingkat pertumbuhan ekonomi, mengajak para investor, tenaga kerja, barang, dan jasa, serta tabungan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Erlangga, Jakarta.

<sup>2</sup> Permana, Chandra Darma, 2009. Analisis Peranan Dan Dampak Investasi Infrastruktur Terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Input-Output, [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

---

<sup>3</sup> Jeddawi, Murtir, 2005. Memacu Investasi Di Era Otonomi Daerah (Kajian Beberapa Perda Tentang Peanaman Modal), UII Press, Yogyakarta.

<sup>4</sup> KPPOD, 2005, Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota Di Indonesia.

<sup>5</sup> Abdullah, Piter., Armida S. Alisjahbana, Nurry Efendi, Budiono. 2002, Daya Saing Daerah (Pendekatan dan Pengukuran di Indonesia), BPFE, Yogyakarta.

Indonesia menerapkan Kawasan Perdagangan khusus di Provinsi Riau untuk menciptakan suasana investasi yang optimal dan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing, untuk mendorong perekonomian. Peraturan Pemerintah No 46, 47, 48 Tahun 2007 menetapkan Riau sebagai tempat menarik bagi investor. Kekayaan alam di Riau memungkinkan industrialisasi, dengan sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang mendukung industri. Sumber daya tambahan termasuk pertambangan, perindustrian, perdagangan, perhotelan, dan lainnya. Investasi asing dan domestik mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi tersebut.

Peran investasi di berbagai sektor dalam meningkatkan produksi barang dan jasa di wilayah Riau Daratan masih terbatas. Pada tahun 2010, investasi berkontribusi 45,59% terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku, naik menjadi 46,25% pada 2014. Namun, nilai multiplier investasi cenderung lebih besar daripada multiplier konsumsi untuk pertumbuhan ekonomi. Mengingat pertumbuhan ekonomi wilayah Riau yang menurun, perlu upaya pemulihan. Pemupukan investasi untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus direncanakan secara berkelanjutan. Dana investasi bisa berasal dari swasta/masyarakat dan pemerintah. Investasi swasta meliputi PMDN dan PMA, sementara pemerintah berinvestasi melalui tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dampaknya adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai rencana pembangunan dan mencapai

target pertumbuhan ekonomi terganggu.<sup>6</sup>

Pemerintah Provinsi Riau telah memastikan perlindungan hukum dan mengatasi hambatan investasi dengan merumuskan peraturan bagi para investor dan penggunaan sumber daya. Ini dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018. DPMPTSP Provinsi Riau telah mencatat data investasi oleh PMDN dan PMA. Pada Triwulan IV Tahun 2022, investasi ini mencapai jumlah sebesar Rp 10,61 triliun, mengalami kontraksi sebesar 21,4% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Triwulan IV Tahun 2021) yang mencapai Rp 13,5 triliun. Terlebih lagi, realisasi investasi PMDN dan PMA di Provinsi Riau pada tahun 2022 mencapai nilai sebesar Rp. 82,5 triliun, mengalami kenaikan signifikan sebesar 55,5% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 (Rp. 53,1 triliun).

PMDN dan PMA pada periode Triwulan IV Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 10,61 triliun, mengalami kontraksi sebesar 21,4 % jika dikomparasikan periode yang sama Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp13,5 triliun. Selanjutnya realisasi investasi PMDN dan PMA Provinsi Riau Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 2021 sebesar Rp. 929,76 milyar atau 8,76% dan Listrik, Gas dan Air sebesar

---

<sup>6</sup> Sri Endang, 2016. ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI DIWILAYAH RIAU DARATAN. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol.7 No.19

Rp.741,14 milyar atau 6,98 %. Juta atau 1,52 %.<sup>7</sup>

Melalui pemaparan persoalan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang fokus membedah “Strategi Pemerintah Riau dalam Meningkatkan Investasi Asing di Provinsi Riau”.

## KERANGKA TEORI

Penulis memperluas kerangka pemikiran agar memudahkan peneliti dalam menentukan tujuan dan arah riset serta mengembangkan konsep yang sesuai untuk membentuk hipotesa. Teori tidaklah pasti, melainkan berfungsi sebagai panduan untuk merumuskan hipotesa. Dalam penelitian ini, diperlukan kerangka pemikiran sebagai panduan peneliti dalam mengidentifikasi, menggambarkan, dan menjelaskan objek penelitian, juga sebagai acuan bagi peneliti.

Viotti dan Kauppi menyatakan bahwa dalam konteks hubungan internasional, terdapat empat asumsi utama dalam pandangan liberalisme.<sup>8</sup>

Partisipasi Indonesia dalam liberalisasi ekonomi melibatkan pandangan yang beragam. Pertama, pemerintah percaya bahwa kondisi domestik memungkinkan untuk bersaing di arena internasional. Kedua, terdapat tekanan dari sisi arah global, maupun regional, juga bilateral yang mendorong Indonesia untuk mengikuti berbagai kerjasama. Ketiga, lambatnya kemampuan pemerintah dalam

meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan diri menyebabkan pengaruh internasional yang berujung pada upaya perbaikan melalui liberalisasi ekonomi.

## Teori Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing (PMA) pada perundang-undangan merujuk pada investasi asing yang dilakukan secara langsung berdasarkan peraturan yang ada. Investasi ini digunakan untuk operasional perusahaan di Indonesia, dimana pemilik modal secara langsung menerima risikonya dari investasi tersebut.<sup>9</sup> Krugman (1991) menggambarkan FDI sebagai aliran modal internasional di mana perusahaan di satu negara memperluas operasinya ke negara lain dengan melakukan kontrol atas perusahaan di luar negeri.<sup>10</sup>

FDI jenis ini biasanya dimulai dengan subsidi atau pembelian saham mayoritas di suatu perusahaan, dan dalam konteks internasional, bentuk investasi ini sering digunakan oleh orang-orang yang bergerak di bidang manufaktur, pengolahan, pengolahan dan penambangan, ekstraksi sumber daya alam, industri jasa, dll. Studi ini mengadopsi teori investasi asing, yaitu resource-seeking FDI, yaitu berinvestasi di negara lain untuk mencari faktor produksi yang lebih efisien daripada menggunakan faktor produksi dalam negeri yang lebih mahal.

<sup>7</sup> <https://dpmptsp.riau.go.id/webnew/detailberita/421/2023/01/25/5>, diakses 12 April 2023

<sup>8</sup> R. Viotti, Paul and Mark V. Kauppi. *International Relations: World Politics*, Fifth Edition, 2013. hal. 11-118

<sup>9</sup> Aminuddin Ilmar (2017) *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta : Kencana. hal. 35

<sup>10</sup> Sarwedi (2002). *Investasi Asing Langsung di Indonesia* Jurnal akutansi & keuangan Vol.4. No.1. Mei 2002. Universitas Kristen Petra. hal. 9

Dalam penelitian ini, teori investasi asing yang diterapkan adalah *resource seeking foreign direct investment*, dimana investasi dilakukan untuk mencari faktor produksi yang lebih efisien di luar negeri daripada menggunakan faktor produksi yang mahal di dalam negeri. Riau yang kaya akan sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan, industri, dan perkebunan, ini adalah daya tarik bagi para investor dalam menanamkan modalnya.

Patrick Morgan mengidentifikasi lima tingkat analisis untuk mengetahui tingkah dan perilaku aktor pada relasi internasional.<sup>11</sup> Pertama, melihat bagaimana individu berinteraksi dalam hubungan internasional. Kedua, tingkat analisis kelompok individu mengasumsikan bahwa tindakan individu lebih sering terjadi dalam konteks kelompok. Ketiga, tingkat analisis negara menekankan peran penting negara sebagai aktor utama. Keempat, tingkat analisis kelompok negara melihat hubungan internasional sebagai hasil interaksi negara. Kelima, tingkat analisis sistem internasional menyoroti bagaimana perilaku dan interaksi internasional dipengaruhi oleh struktur sistem internasional.

#### **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan teknik studi literatur untuk mengumpulkan data. Data dikumpulkan secara kualitatif melalui buku, jurnal, artikel, dan informasi dari literatur yang relevan.

---

<sup>11</sup> Mohtar Mas'ood. 1990. *Ilmu Hubungan internasional : Disiplin dan metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES. Hal.40

Semua data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data utama, dan Sumber data studi didapatkan dari sumber primer berbentuk wawancara, jajak pendapat individu atau kelompok, observasi objek, peristiwa, atau hasil tes. 6 research, penulis memanfaatkan buku-buku, jurnal, artikel-artikel dan berita-berita yang berasal dari berbagai media.

Diikuti oleh Singapura dan Malaysia, keduanya secara rutin menjalankan penelitian pada setiap tahunnya dengan total investasi mencapai 489.009.879 Dolar Amerika Serikat dan 413.036.643 Dolar Amerika Serikat. Posisi berikutnya, pada peringkat keempat, diisi oleh Taiwan dengan investasi sebesar 398.500.000 Dolar Amerika Serikat hanya pada tahun 2018. Namun, untuk tahun-tahun berikutnya, Taiwan tidak melanjutkan tren investasinya di Riau.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN MENINGKATKAN INVESTASI ASING DI PROVINSI RIAU**

Lingkungan investasi mencakup kebijakan, institusi, dan perilaku yang memainkan peran dalam menentukan risiko dan potensi pengembalian investasi. Faktor-faktor ini berpengaruh pada ketertarikan investor terhadap pembukaan usaha baru atau perluasan. Lingkungan ini terus berubah sesuai dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, lokasi juga memiliki dampak signifikan pada lingkungan investasi, karena perbedaan dalam ekonomi global, nasional, regional, dan lokal memberikan vektor berbeda dalam usaha memperbaiki lingkungan investasi di Provinsi Riau.

## **1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau**

Pemerintah Provinsi Riau melalui DPMPTSPJ, melakukan penginventarisasian dan persiapan respon terhadap umpan balik yang mungkin timbul. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan presiden terkait investasi, daerah yang memiliki potensi pertumbuhan investasi diharapkan menyusun RUPM yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan perencanaan dalam investasi di tingkat provinsi dan nasional.

Infrastruktur yang tersedia di Riau untuk saat ini masih perlu perbaikan, terutama untuk jalur khusus transportasi perusahaan. Bagi para investor ini akan menjadi hal yang menguntungkan secara finansial dan ke langsung perusahaan. Selanjutnya regulasi birokrasi yang merumuskan kebijakan pelayanan satu atap atau sistem pelayanan terpadu satu pintu, telah berhasil mengembalikan iklim investasi ke iklim yang sehat terkait penurunan investasi yang masuk di tahun 2010.

### **1.1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal**

Untuk memperkuat lembaga penanaman modal di Provinsi Riau, terjadi kerja sama antara lembaga penanaman modal dan pemerintah daerah. Ini termasuk dalam mengkoordinasikan penanaman modal dengan unit-unit kerja pemerintah daerah (oPD). Langkah-langkah yang dilakukan untuk memperkuat lembaga penanaman modal meliputi:

1. PTSP untuk memudahkan perizinan penanaman modal.
2. Pihak DPMPTSP menjadi penyelenggara penanaman modal dengan otoritas dari Gubernur Riau untuk perizinan di tingkat provinsi.
3. Peningkatan koordinasi antara lembaga/instansi pemerintah daerah untuk pelayanan penanaman modal yang lebih baik.
4. Lembaga penanaman modal diarahkan untuk menjadi inisiator dan fasilitator penanaman modal di wilayah Provinsi Riau.

### **1.2. Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan**

Bidang usaha yang tertutup dan terbuka diatur oleh ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan tujuan mengarahkan investasi. Pemerintah Provinsi Riau mendukung langkah-langkah seperti:

1. Mengatur berbagai bidang usaha yang tertutup berdasarkan kriteria kesehatan, moral, dan lainnya.
2. Mengatur berbagai bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang memperhatikan kepentingan nasional.
3. Penyesuaian pengaturan bidang usaha dengan karakteristik lokal dan nasional.
4. Pengaturan harus jelas dan tidak bertentangan dengan perjanjian internasional.

### **1.3. Persaingan Usaha**

Persaingan usaha yang sehat penting untuk kemajuan ekonomi. Pemerintah Provinsi Riau perlu:

1. Menetapkan kebijakan untuk pelatihan pekerja secara berkelanjutan.

2. Mendorong perundingan kolektif yang harmonis antara buruh dan pengusaha.
3. Memantau dan menindak kegiatan anti-persaingan.

#### **1.4. Hubungan Industrial**

Hubungan industrial yang sehat mendukung pengembangan sumberdaya manusia. Pemerintah Provinsi Riau perlu: 1. Mendorong perusahaan memberikan pelatihan dan peningkatan ketrampilan bagi pekerja. 2. Mendorong perundingan yang harmonis antara buruh dan pengusaha. 3. Mengawasi dan mengikuti perkembangan praktek persaingan usaha.

#### **1.5. Sistem Perpajakan Kepabeanaan**

Sistem perpajakan dan kepeanaan yang sederhana dan efektif diperlukan. Pemerintah Provinsi Riau perlu mengidentifikasi jenis dan tata cara pemungutan pajak sebagai insentif penanaman modal. Selain itu, perlu menyederhanakan sistem administrasi perpajakan daerah dan memberikan insentif bagi penanam modal di sektor-sektor tertentu.<sup>12</sup>

Dalam rangka penguatan kelembagaan dan pemantauan penanaman modal, DPMPTSP memiliki peran penting. Juga, hubungan industrial yang baik dan sistem perpajakan kepeanaan yang tepat akan mendukung perkembangan ekonomi Provinsi Riau.

### **2. Peningkatan Sektor-sel Sector: Pangan, Infrastruktur, Energi, dan Pariwisata**

#### **2.1. Pangan**

Pangan adalah salah satu tanggung jawab pemerintah di luar layanan dasar, hak untuk memiliki pangan yang memadai juga termasuk dalam hak asasi manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 UUD 1945, yang lebih lanjut ditegaskan melalui Undang-Undang No 18/2012 tentang pangan. Jika pasokan pangan tidak sejalan dengan kebutuhan, ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan politik di suatu negara atau wilayah. Oleh karena itu, Ketahanan Pangan adalah isu penting yang harus diberikan perhatian oleh pemerintah dan otoritas daerah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Ketahanan Pangan merujuk pada "Kondisi pangan mencukupi dari tingkat negara hingga individu, yang tercermin dalam ketersediaan pangan yang memadai dalam hal jumlah dan kualitas, keamanan, variasi, gizi, distribusi merata, terjangkau, dan sesuai dengan nilai-nilai agama, keyakinan, serta budaya masyarakat, guna mendukung kehidupan sehat, produktif, dan berkelanjutan."

Pangan adalah hak azasi manusia dan penting bagi negara. Ketahanan Pangan, atau pangan cukup, aman, bergizi, dan terjangkau, adalah tujuan utama. Strateginya melibatkan: Memastikan ketersediaan pangan berkualitas dan beragam. Meningkatkan teknologi dan lahan pertanian. Memacu tingginya nilai tukar petani. Untuk mampu menguatkan sistem informasi pertanian.

---

<sup>12</sup> "Permendagri No. 64," 2012

## **2.2. Infrastruktur**

Infrastruktur adalah kunci pertumbuhan dalam bidang ekonomi. Adanya pembangunan infrastruktur itu mencakup konstruksi dan efisiensi bisnis. Ini dilakukan oleh pemerintah dan swasta, dan fokus pada: Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur baru sesuai kebutuhan. Integrasi infrastruktur nasional dan provinsi. Pembangunan infrastruktur di wilayah yang berkembang.

## **2.3. Energi**

Energi memiliki peran krusial dalam perkembangan ekonomi melalui partisipasinya dalam merangsang aktivitas produksi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga sangat bergantung pada faktor pendukung berupa ketersediaan energi yang berkelanjutan, termasuk dalam hal pasokan yang dapat diandalkan, stabilitas harga, dan aksesibilitas yang mudah.

Energi penting untuk ekonomi yang berkelanjutan. Diversifikasi sumber energi dan nilai tambahnya adalah tujuannya. Langkah-langkahnya melibatkan: Memanfaatkan sumber energi yang belum dioptimalkan. Menggunakan bahan bakar energi selain minyak bumi.

## **2.4. Pariwisata**

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha diharapkan memastikan serta

mendorong agar kegiatan berwisata tetap diakses oleh setiap individu, sehingga mendukung peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan yang lebih baik, serta kerja sama antarbangsa yang erat dalam mencapai perdamaian dan kesatuan dunia. Untuk menyikapi ragam dinamika global juga semakin kuatnya perolehan hak individu masyarakat untuk dapat mendapatkan istirahat melalui berlibur dan berwisata, perubahan perlu dilakukan. Peran penting pariwisata dalam perekonomian dan kebahagiaan tetap tidak terbantahkan.

Pariwisata berkontribusi pada ekonomi dan kebahagiaan. Pengembangan pariwisata berkelanjutan penting dan perlu: Menjamin hak wisata sebagai hak asasi manusia. Mengembangkan pariwisata berdasarkan keunikan dan kebhinekaan.

Penyelenggaraan pariwisata yang berencana dan terpadu. Mendukung pariwisata sebagai motor ekonomi.

Melalui langkah-langkah ini, sektor-sektor tersebut akan berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau.

## **3. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan**

Kebijakan pengembangan investasi yang mengutamakan kelestarian lingkungan didasarkan pada beberapa faktor penting, seperti dampak dari proyek pembangunan dan investasi terhadap kemampuan dan daya tampung lingkungan. Dampak ini mungkin mengakibatkan degradasi

lingkungan dan mengancam keseimbangan ekosistem. Di samping itu, isu lingkungan juga berperan sebagai salah satu komponen dalam negosiasi global. Dengan kata lain, secara tidak langsung, ada pihak yang harus menanggung konsekuensi ekonomi akibat penurunan kapasitas dan daya tampung lingkungan karena aktivitas investasi.

Dalam arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Riau 2019-2025, upaya untuk menarik investasi yang memperhatikan lingkungan akan difokuskan pada dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pencegahan dan pendekatan penghargaan.<sup>13</sup>

Pendekatan pencegahan adalah langkah-langkah untuk menghindari terjadinya dampak negatif pada lingkungan akibat aktivitas investasi. Langkah ini melibatkan proses pengidentifikasian dan pemetaan kapasitas serta kinerja lingkungan hidup yang perlu dijaga dan dikelola.

Pendekatan ini diadopsi dengan tujuan mencegah penempatan investasi di wilayah yang memiliki kapasitas dan kinerja lingkungan yang rentan terhadap tekanan, risiko bencana alam, beban demografi, serta aktivitas sosial dan ekonomi.

Pendekatan penghargaan merupakan langkah untuk mengakui investasi yang mampu memperkuat kualitas dan kapasitas lingkungan hidup.

Pendekatan ini diimplementasikan melalui penyediaan fasilitas, kemudahan, dan insentif bagi proyek penanaman modal yang berkontribusi pada peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Diharapkan bahwa kebijakan investasi yang mempertimbangkan dampak lingkungan dapat menghasilkan keselarasan antara perkembangan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Pemerintah Provinsi Riau telah merumuskan tiga strategi operasional dalam konteks investasi yang memperhatikan lingkungan, yakni:

1. Investasi yang memiliki kapasitas memulihkan daya dukung dan daya tampung lingkungan akan mendapatkan dukungan pemerintah melalui fasilitas, insentif, serta kemudahan. Contohnya, perusahaan yang berfokus pada reboisasi, pelestarian sumber air, dan pengelolaan limbah akan mendapatkan dukungan.
2. Investasi yang tidak menghasilkan polusi menjadi fokus pemerintah, dan perusahaan yang aktivitas produksinya tidak menciptakan polusi atau ancaman kerusakan dan pencemaran lingkungan akan diberikan kemudahan, insentif, dan fasilitas. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan.

<sup>13</sup> <https://jdih.riau.go.id/>, diakses 14 April 2023

3. Pemerintah memberikan kemudahan, insentif, dan fasilitas bagi investasi yang mampu mengontrol dampak kerusakan lingkungan. Meskipun aktivitas produksinya berpotensi menciptakan polusi atau merusak lingkungan, perusahaan yang berkomitmen untuk mengendalikan dampaknya, seperti perusahaan yang menerapkan sistem manajemen lingkungan (ISO 14001), akan mendapatkan dukungan.

Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

#### **4. Strategi-strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam Meningkatkan Investasi di Provinsi Riau**

Pemerintah Provinsi Riau menerapkan dua strategi inti untuk memberdayakan UMKM dan koperasi, yaitu strategi peningkatan kualitas dan strategi kerjasama.

##### **4.1. Strategi Naik Kelas**

Strategi peningkatan skala adalah usaha untuk mengembangkan UMKM dan koperasi dari kategori mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah, serta dari menengah menjadi besar. Pemerintah Provinsi Riau akan menjalankan pendekatan ini dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memperbarui data UMKM dan koperasi di Provinsi Riau dengan melakukan

verifikasi dan identifikasi UMKM dan koperasi yang memiliki potensi untuk berkolaborasi dengan investasi dalam negeri (PMDN) maupun investasi asing (PMA).

- b. Mengadakan program peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi melalui aspek administrasi, manajemen, teknis, keuangan, inovasi, dan teknologi.
- c. Membantu UMKM dan koperasi dalam memperkenalkan produk-produk mereka kepada pasar dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai pameran promosi, acara perdagangan (trade expo), pertemuan bisnis (matchmaking) dengan investor potensial, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

##### **4.2. Strategi Aliansi**

Strategi aliansi adalah upaya untuk membangun kerjasama antara pelaku usaha UMKM dan koperasi, baik antar UMKM dan koperasi, maupun antara UMKM dan koperasi dengan usaha besar. Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan hal ini dengan:

- a. Bantu investor dalam mengidentifikasi peluang kerjasama dengan industri yang dapat mengintegrasikan UMKM dan koperasi yang ada.

---

<sup>14</sup> Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, 2022

- b. Apresiasi investor yang memasukkan UMKM dan koperasi dalam proses produksi melalui paket kebijakan yang memberikan fasilitas, kemudahan, dan insentif.
- c. Bentuk berbagai kebijakan untuk memfasilitasi akses pendanaan UMKM dan koperasi dari lembaga perbankan, termasuk penggunaan skema subsidi suku bunga perbankan, penyediaan modal dengan suku bunga terjangkau, dan tindakan lainnya.
- d. Maksimalkan pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang ada untuk mendukung peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM dan koperasi yang berfokus pada sektor-sektor yang menjadi prioritas daerah.
- g) Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan sertifikasi.

Pemerintah Provinsi Riau juga melakukan promosi dan kerjasama penanaman modal, yaitu: Inventarisasi konten mengenalkan atau promosi melalui sebuah data spasial ataupun non-spasial yang relatif akurat juga mutakhir. Inventarisasi target promosi baik dari aspek object, event, media, frekuensi, skala global, nasional, regional, dan lokal. Inventarisasi dan mempersiapkan materi respon atas feedback yang mungkin akan muncul.

Pemerintah Provinsi Riau berharap dengan strategi-strategi ini, UMKM dan koperasi di Provinsi Riau dapat berkembang dan menjadi lebih mandiri, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah.

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkap bahwa investasi di Provinsi Riau mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dalam sektor perkebunan. Pendekatan yang diterapkan melibatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, penguatan aparat pemerintah dalam mendukung investasi, pengenalan kebijakan dan regulasi untuk memastikan kejelasan hukum dan kewajiban pajak, pembaruan data investasi, serta upaya promosi melalui platform internet dan strategi promosi berkelanjutan. Meskipun sektor perkebunan berada di peringkat ketiga setelah industri kertas dan industri listrik/air dalam data investasi, kelanjutan pertumbuhan investasi

Pemerintah Provinsi Riau juga menyediakan berbagai fasilitas, kemudahan, dan insentif untuk mendorong penanaman modal, termasuk:

- a) Upaya pengurangan pajak dan atau retribusi.
- b) Pemberian data dan informasi mengenai peluang investasi.
- c) Penyediaan fasilitas dan infrastruktur.
- d) Penyediaan area atau lokasi investasi.
- e) Bantuan dalam bentuk dukungan teknis.
- f) Verealisasi dan percepatan proses perizinan.

dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, tata ruang wilayah yang perlu direncanakan dengan baik, konflik lahan dengan masyarakat, dan kendala-kendala perizinan yang masih perlu diselesaikan dalam konteks reformasi perizinan..

Untuk upaya peningkatan investasi, yang dilakukan DPMPTSP telah berperan penting, walaupun pandemi Covid-19 menyebabkan kendala dalam menjalankan kegiatan dan program yang direncanakan. Meskipun demikian, upaya pembangunan terutama di Kawasan Industri Tenayan (KIT) tetap mendorong peningkatan nilai investasi.

Meskipun upaya pemerintah provinsi dalam menjaga iklim investasi telah memberikan hasil, masih ada potensi pemaksimalan lebih lanjut. Infrastruktur di Provinsi Riau perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transportasi perusahaan untuk memastikan keamanan masyarakat dan kelangsungan perusahaan. Pemerintah daerah juga akan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang aktif. Regulasi birokrasi, khususnya pelayanan terpadu satu pintu, telah berhasil memulihkan iklim investasi setelah penurunan di tahun 2010.

Secara keseluruhan, masyarakat Riau menunjukkan antusiasme dalam program investasi dan memahami pentingnya investasi sebagai alat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Meskipun tantangan dan hambatan masih ada, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak telah mengarahkan Provinsi Riau menuju peningkatan investasi yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Piter., Armida S. Alisjahbana, Nurry Efendi, Budiono. 2002, *Daya Saing Daerah (Konsep dan Pengukurannya di Indonesia)*, BPFE, Yogyakarta.

Aminuddin Ilmar. 2017. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta : Kencana

Jauch Lawrence R. & Glueck William F. 1989. *Manajemen Dan Strategis Kebijakan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga

KPPOD, 2005, *Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota Di Indonesia*.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Erlangga, Jakarta.

Mas'ood, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan internasional : Disiplin dan metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES

Meleong. Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

R. Viotti, Paul and Mark V. Kauppi. 2013. *International Relations: World Politics, Fifth Edition*

Asrina Br Siallagan. 2016. *Pengaruh Kebijakan Foreign Direct Investment (FDI) terhadap bisnis ritel di Indonesia*. *Jurnal JOM Fisip* Vol.3. No.2 Oktober 2016

Bambang Kustianto dan Istikomah (1999). *"Peranan Modal*

- Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.14, No. 2
- Bank Indonesia Perwakilan Riau, 2015
- Bappeda Provinsi Riau, 2022
- BPS, 2012. Riau Dalam Angka 2011, Pekanbaru.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, 2022
- Jeddawi, Murtir. 2005. Memacu Investasi Di Era Otonomi Daerah (Kajian Beberapa Perda Tentang Peanaman Modal), UII Press, Yogyakarta
- "Permendagri No. 64," 2012
- Permana, Chandra Darma, 2009. Analisis Peranan Dan Dampak Investasi Infrastruktur Terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Input-Output, [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Prosiding Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Riau Tahun 2022
- Sarwedi. 2002. Investasi Asing Langsung di Indonesia dan faktor yang mempengaruhinya. Jurnal akutansi & keuangan Vol.4. No.1. Mei 2002. Universitas Kristen Petra
- Sri Endang. 2016. ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI DIWILAYAH RIAU DARATAN. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol.7 No.19
- <https://dpmptsp.riau.go.id/webnew/detailberita/421/2023/01/25/realisasi-investasi-pma-dan-pmdn-tahun-2022-mencapai-135,6-%--dan-menduduki-peringkat-5>, diakses 12 April 2023
- <https://www.scribd.com/doc/187118418/Landasan-Teori-Definisi-Konsepsional-Definisi-Operasional>
- <peraturan.bpk.go.id>, diakses 12 April 2023
- <https://jdih.riau.go.id/>, diakses 14 April 2023
- [Laporan Perekonomian Provinsi Riau Februari 2023 \(bi.go.id\)](Laporan Perekonomian Provinsi Riau Februari 2023 (bi.go.id)), diakses 14 April 2023
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191230/9/1185486>